



Manajemen berbasis masyarakat dalam pengelolaan PAUD

Trias Aprilyani ^{1,*} Qosim Khoiri Anwar ²

¹ Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jalan Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, 55281, Indonesia

² Hukum Ekonomi Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, 57168, Indonesia

*Corresponding Author. Email: 19204030029@student.uin-suka.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang: 1) manajemen berbasis masyarakat dalam pengelolaan PAUD di Pos PAUD Wijaya Kusuma Yogyakarta; 2) keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya; serta 3) strategi pengelola lembaga dalam mengatasi hambatan pengelolaannya. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara uji keabsahan data dilakukan dengan model analisis Miles & Huberman melalui proses reduksi data, display data, dan pembuatan konklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) manajemen Pos PAUD Wijaya Kusuma Yogyakarta berada di tangan masyarakat melalui Pokja II (Kelompok Kerja) PKK RW 6 Tegalrejo Yogyakarta; 2) pos PAUD Wijaya Kusuma termasuk lembaga PAUD HI (Holistik Integratif) yang dalam pelaksanaan program pendidikannya menjalin kemitraan dengan Posyandu, Bina Keluarga Balita (BKB), dan Puskesmas; 3) upaya yang dilakukan pengelola dalam mengatasi berbagai hambatan pengelolaan Pos PAUD diantaranya: 1) terkait manajemen sumber daya manusia, pengelola Pos PAUD Wijaya Kusuma mengikutsertakan para pendidiknya secara berkala dalam diklat-diklat PAUD; 2) terkait manajemen keuangan, pengelola Pos PAUD Wijaya Kusuma menghimpun dana operasional lembaga melalui penarikan SPP, serta dengan mengakses berbagai bantuan dana dari pemerintah pusat, daerah, maupun desa; 3) terkait manajemen sarana prasarana, perawatan dan pengadaan sarana prasarana penunjang kegiatan pembelajaran dilakukan secara terprogram untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran; 4) evaluasi lembaga dan program PAUD maupun pembinaan lembaga dilakukan melalui koordinasi intensif dengan penilik PAUD dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Kata Kunci: manajemen lembaga PAUD, pengelolaan pos PAUD, manajemen berbasis masyarakat

Society-based management in the PAUD management

Abstract

The purpose of this study was to obtain information about: 1) community-based management in PAUD management at the Wijaya Kusuma PAUD Post Yogyakarta; 2) community involvement in its management; and 3) strategies of institutional managers in overcoming obstacles to their management. The research methodology used is qualitative research. The data collection techniques were carried out through observation, interviews and documentation. Meanwhile, the data validity test was carried out using the Miles & Huberman analysis model through the process of data reduction, data display, and making conclusions. The results showed that: 1) the management of the Wijaya Kusuma PAUD Yogyakarta Post was in the hands of the community through the Pokja II (Working Group) PKK RW 6 Tegalrejo Yogyakarta; 2) Wijaya Kusuma PAUD Post is an HI (Holistic Integrative) PAUD institution which in implementing its educational program establishes partnerships with Posyandu, Toddler Family Development (BKB), and Puskesmas; 3) efforts made by the manager in overcoming various barriers to the management of PAUD Posts include: 1) regarding human resource management, the manager of the PAUD Wijaya Kusuma Post regularly includes educators in PAUD trainings; 2) regarding financial management, the manager of the

Wijaya Kusuma PAUD Post collects operational funds for the institution through the withdrawal of SPP, as well as by accessing various funding assistance from the central, regional, and village governments; 3) regarding the management of infrastructure facilities, maintenance and procurement of infrastructure facilities to support learning activities are carried out programmatically to support the implementation of learning; 4) evaluation of PAUD institutions and programs as well as institutional development is carried out through intensive coordination with PAUD inspectors from the Yogyakarta City Education Office.

Keywords: PAUD institution management, PAUD post management, community-based management.

How to cite: Aprilyani. T. & Anwar. Q. A. (2021). Manajemen berbasis masyarakat dalam pengelolaan PAUD. *Journal of Nusantara Education*, 1(1), 9-18.

Pendahuluan

Pada usia 0-4 tahun, perkembangan intelektual anak dapat berkembang hingga mencapai 50%, dan pada 4 tahun berikutnya akan bertambah 30%. Penemuan ini merupakan hasil penelitian Osbon, White, dan Bloom di bidang neurosains yang membuktikan bahwa untuk memaksimalkan potensi kecerdasan, IQ anak dapat dirangsang sedini mungkin melalui proses yang tepat (Suyadi, 2014). Oleh karena itu, usia dini di rentang usia 0-6 tahun merupakan masa emas tumbuh kembang anak yang sangat menentukan kualitas intelektualnya di masa yang akan datang. Berangkat dari hasil penelitian para ahli tentang neurosains serta memperhatikan dinamika globalisasi maupun inovasi teknologi yang tiada henti, maka penting bagi pemerintah untuk dapat menyiapkan generasi yang mampu bersaing sepadan dengan kemajuan iptek dan perkembangan dunia global. Oleh karena itu, dalam upaya pembangunan manusia yang berkualitas, rencana strategis (Renstra) Kemendikbud Tahun 2020-2024 berorientasi untuk meningkatkan perluasan akses pendidikan bagi semua warga negara, pemerataan mutu pendidikan, serta memberikan perhatian khusus kepada masyarakat marginal dari segi lingkungan geografis dan kondisi ekonomi dimulai dari jalur pendidikan usia dini. (Kemdikbud, 2020).

Sebenarnya perhatian pemerintah terhadap pentingnya pemerataan layanan PAUD berkualitas telah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu. Keseriusan ini dibuktikan dengan dimulainya pendirian Direktorat PAUD di bawah naungan Dirjen PLS (Ditjen PNFI) di tahun 2001 yang bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap pendidikan nonformal (KB, TPA, POS PAUD) dan informal untuk anak usia 0-4 tahun. Adapun salah satu

wujud keseriusan pemerintah dalam mengupayakan pemerataan mutu pendidikan tersebut diwujudkan dengan dicanangkannya program satu desa satu PAUD oleh Kemendikbud di tahun 2011.

Sejak dicanangkannya program satu desa satu PAUD tersebut, penyelenggaraan PAUD menjadi sebuah pergerakan nasional yang luar biasa. Program ini mewajibkan pendirian minimal 1 lembaga PAUD setiap desa/kelurahan untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak usia dini. Harapannya layanan PAUD tersebut mampu menjadi wadah untuk menumbuhkembangkan bakat, minat dan potensi anak usia dini secara merata di seluruh penjuru tanah air. Program satu desa satu PAUD secara signifikan mendorong meningkatnya pertumbuhan PAUD-PAUD di berbagai wilayah. Bahkan dalam kurun waktu 3 tahun sejak diprogramkan, sebanyak 71% desa telah memiliki PAUD. Dan berdasarkan hasil penelusuran sumber data Laporan Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud, Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Kemendikbud mengalami peningkatan secara signifikan sejak saat itu (Aprianti, 2020).

Salah satu factor pendorong meningkatnya APK PAUD Kemendikbud adalah lahirnya Pos PAUD-Pos PAUD di tingkat RW yang diselenggarakan hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Pos PAUD merupakan salah satu perwujudan Satuan PAUD Sejenis (POS PAUD) yang pengelolaannya dilakukan secara integratif bersama Posyandu dan Bina keluarga Balita (BKB). Integrasi layanan tersebut dikenal dengan sebutan PAUD Holistik Integratif. Secara manajerial, Pos PAUD dikelola secara swadaya oleh masyarakat melalui peran kelompok kerja II PKK serta berada di bawah pembinaan pemerintah desa/kelurahan. Keberadaan Pos PAUD ini

dimaksudkan untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak usia dini yang belum terlayani pendidikannya di lembaga PAUD lainnya seperti di TK, KB dan TPA (Dirjen PAUDNI, 2011).

Namun demikian sebagai perwujudan dari manajemen PAUD berbasis masyarakat, penyelenggaraan Pos PAUD terlaksana bukan tanpa kendala. Banyak kendala dihadapi pengelola yang diantaranya terkait masalah pendanaan, kuantitas dan kualitas SDM, hingga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya PAUD. Oleh karena itu, meskipun hanya dalam wadah manajemen pendidikan berbasis masyarakat, layanan pos PAUD mestinya tetap harus memiliki strategi manajemen yang baik, agar Pos PAUD dapat bertahan dan terselenggara dengan baik.

Melalui penelitian ini akan dikaji lebih jauh tentang manajemen berbasis masyarakat dalam pengelolaan PAUD dengan mengambil studi kasus di Pos PAUD Wijaya Kusuma Yogyakarta. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang strategi manajemen yang baik dalam mengelola Pos PAUD sebagaimana yang diterapkan di Pos PAUD Wijaya Kusuma. Dengan berkiblat pada strategi manajemen di lembaga tersebut, diharapkan Pos PAUD lainnya dapat mengaplikasikan model manajemen serupa untuk dapat mempertahankan eksistensi lembaganya, serta dapat menjadi lembaga PAUD yang baik dan berkualitas.

Kebijakan PAUD Non-Formal di Indonesia

Pada tahun 1990, dalam konferensi UNESCO di Thailand, Indonesia turut menandatangani sebuah Deklarasi Dunia. Deklarasi tersebut merupakan komitmen bersama semua negara anggota UNESCO untuk menyediakan pendidikan dasar yang tidak diskriminatif serta bermutu di masing-masing negara. Hal ini sekaligus sebagai upaya untuk memenuhi hak pendidikan sebagaimana dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus cuma-cuma, setidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan dasar diperlukan untuk menjaga

perdamaian” dalam pasal 26 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (Kemdikbud, 2020).

Di Indonesia sendiri, dalam pasal 31 UUD 1945 telah diamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak anak bangsa sekaligus menjadi kewajiban bagi Negara untuk menyelenggarakannya. Oleh sebab itu, pemerataan pendidikan harus dirasakan hingga di setiap daerah di Indonesia. Tujuan dari pemerataan pendidikan ini adalah demi memajukan peradaban dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diselenggarakan.

Program PAUD merupakan salah satu program yang dicanangkan Pemerintah melalui Kemendikbud untuk mendukung terciptanya SDM bermutu dan berkualitas sebagai agen perubahan peradaban. Komitmen Pemerintah ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin hak atas “Pendidikan dasar” bagi warga negara. Secara eksplisit UU Sisdiknas turut mencantumkan tentang Pendidikan Anak Usia Dini (pasal 28), hal ini membuktikan bahwa PAUD menjadi bagian penting dalam penyiapan SDM di masa yang akan datang. Demi mendukung terwujudnya dan terselenggaranya PAUD yang bermutu dan berkualitas, Kemdikbud menghimbau agar pemerintah daerah turut berkontribusi dalam pelayanan PAUD terutama terkait masalah pendanaan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 49 ayat 1 yang mengatur tentang dana pendidikan yang dialokasikan sebesar 20% dari APBD dan APBN.

Terkait masalah pendanaan pendidikan, Pembagian tanggung jawab pendanaan pendidikan antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat telah diatur dalam PP Nomor 48 Tahun 2008. Untuk penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat, ketentuan pendanaan ditetapkan untuk ditanggung sendiri secara swadaya, namun didukung dana bantuan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Kebijakan bantuan dana dari pemerintah daerah ini diatur dalam Kebijakan otonomi daerah. Melalui kebijakan otonomi terjadi pelimpahan

sebagian urusan pemerintah pusat ke daerah di berbagai sektor. Diantaranya adalah sektor pendidikan. Melalui pelimpahan kewenangan tersebut penentuan kebijakan-kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan kini menjadi hak dan kewajiban pemerintah masing-masing daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu mengatur ketersediaan sumber daya di daerahnya masing-masing untuk mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di semua jalur pendidikan. (Tedjawati, 2020).

Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini

Manajemen merupakan suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan pengarahan suatu kelompok orang ke arah tujuan-tujuan organisasional. (George R. Terry, 2010). Inti dari sebuah manajemen adalah pengelolaan. Sementara itu, manajemen pendidikan secara umum dapat diartikan sebagai suatu penataan bidang garapan pendidikan melalui perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pembinaan, pengkoordinasian, pengomunikasian, pemotivasian, penganggaran, pengendalian, pengawasan, penilaian dan pelaporan secara sistematis dan berkualitas untuk mencapai tujuan pendidikan (Tim Dosen UPI, 2011). Apabila dikaitkan dengan PAUD, maka manajemen PAUD dapat diartikan sebagai upaya mengelola, mengatur, dan mengarahkan proses interaksi edukatif antara anak didik dan guru, serta lingkungan secara teratur, terencana dan tersistematisasi untuk mencapai tujuan lembaga PAUD (Suyadi, 2013).

Dalam dunia pendidikan, manajemen memegang peranan penting sebagai penunjang pengelolaan lembaga pendidikan. Terdapat tujuh komponen penting manajemen pendidikan yang harus diketahui, yaitu manajemen: (1) Kurikulum; (2) Keuangan; (3) Sarana Prasarana; (4) Pendidik; (5) Tenaga Kependidikan; (6) Peserta Didik; (7) Evaluasi (Ulfah, 2015). Manajemen PAUD ini memiliki fungsi dan tujuan. Adapun tujuan utama manajemen PAUD adalah untuk mencapai tujuan organisatoris lembaga secara efektif dan efisien. Efektif dan efisien berarti terlaksanakannya seluruh program

pendidikan secara tepat melalui keterlibatan seluruh komponen lembaga PAUD. Sementara fungsi manajemen PAUD adalah untuk perencanaan (memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki); pengorganisasian (membagi kegiatan besar menjadi kegiatan kecil untuk dibebankan kepada penanggung jawab pelaksana agar memudahkan manajer dalam melakukan pengawasan); pengarahan (tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha mencapai sasaran sesuai perencanaan manajerial); dan pengendalian melalui evaluasi (proses pengawasan dan pengendalian performa organisasi lembaga untuk memastikan jalannya lembaga telah sesuai rencana yang ditetapkan) (Suyadi, 2013).

Manajemen Berbasis Masyarakat Dalam Pengelolaan PAUD

Dalam sebuah jurnal penelitian dikatakan bahwa PAUD berbasis masyarakat merupakan layanan pendidikan untuk anak usia dini yang diselenggarakan masyarakat dan untuk masyarakat (Ulfah, 2015). Keterlibatan aktif masyarakat memang dibutuhkan dalam upaya pembaharuan paradigma pendidikan. Hal ini disebabkan karena masyarakat memiliki peran strategis dan sentral dalam peningkatan kualitas dan mutu pendidikan. Oleh karena itu, tawaran paradigma pengelolaan pendidikan berbasis masyarakat menjadi sebuah pilihan yang solutif untuk menggantikan model pengelolaan pendidikan berbasis pemerintah.

Arus globalisasi dan demokrasi dalam segala bidang turut serta menjadi pendorong kemunculan model pendidikan berbasis masyarakat tersebut. Dalam situasi dan kondisi seperti saat ini, desentralisasi pengelolaan pendidikan dapat dilakukan melalui pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif seluas-luasnya dalam pengelolaan pendidikan. Atau dengan kata lain, pendidikan berbasis masyarakat merupakan wujud penyelenggaraan pendidikan yang berprinsip “dari, oleh dan kembali untuk masyarakat” (Machali, 2020).

Dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 26 disebutkan bahwa pendidikan berbasis

masyarakat pada jalur nonformal diselenggarakan bagi masyarakat. Adapun salah satu jenis layanannya adalah berupa PAUD. Sementara itu, berkenaan dengan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sebenarnya telah diatur oleh UU Sisdikan No. 20 Tahun 2003 dalam pasal 54, 55 dan 56. Pasal 54 menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pendidikan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan sebagai penyelenggara dan pengendali mutu pendidikan. Masyarakat juga dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Adapun pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat diatur pada pasal 55 dimana masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal. Adapun pengembangan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya dilakukan sesuai dengan SNP. Dalam kaitannya dengan dana penyelenggaraan pendidikan, dapat diperoleh melalui swadaya penyelenggara, bantuan masyarakat, bantuan pemerintah pusat, bantuan pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara terkait bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain dapat diperoleh dari pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah secara adil dan merata (Kemendikbud, 2013).

Berdasarkan ketentuan pasal 26 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, Pendidikan Berbasis Masyarakat dalam jalur pendidikan Nonformal bagi anak usia dini, pelaksanaannya dapat diwujudkan dalam bentuk Satuan PAUD Sejenis (POS PAUD) berupa Pos PAUD. Pos PAUD ini utamanya ditujukan bagi anak usia lahir-6 tahun yang tidak terlayani pada lembaga pendidikan anak usia dini lainnya (Seperti TK, KB, TPA).

Perwujudan Pendidikan Berbasis Masyarakat dalam Pos PAUD

Pos PAUD merupakan salah satu wujud pendidikan berbasis masyarakat ditinjau dari pola manajemen. Pos PAUD memiliki hak

otonomi untuk melakukan model *self management*. Pos PAUD dibentuk atas kerjasama masyarakat dan dikelola secara gotong royong, suka rela, dan rasa kebersamaan. Keberadaan Pos PAUD ini mendapat pembinaan langsung oleh Tim Pembina Tingkat Desa/Kelurahan (TPD/K) yang beranggotakan unsur-unsur perangkat desa/kelurahan, Dewan Perwakilan Desa/Kelurahan, tokoh masyarakat/agama, dan Tim Penggerak PKK.

Dalam Pos PAUD terdapat prinsip-prinsip yang melandasi penyelenggaraannya, yaitu; (1) Program pembelajaran Pos PAUD dilakukan dalam bentuk pengasuhan bersama untuk anak usia 3-30 bulan dengan minimal pertemuan 1 kali/minggu, kemudian bermain bersama untuk anak usia 31-48 bulan dengan minimal pertemuan 2 kali/minggu, usia 49-60 bulan dengan minimal pertemuan 3 kali/minggu, dan usia 61-72⁺⁺ bulan dengan minimal pertemuan 4 kali/minggu; (2) Ketersediaan Alat Permainan Edukatif (APE); (3) Terdapat pengelola PAUD yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala desa /lurah untuk jangka waktu tertentu yang diwujudkan dalam bentuk struktur organisasi pengelola Pos PAUD; (4) Ketersediaan Tempat, meskipun menggunakan fasilitas umum di desa (seperti balai desa) yang mudah dijangkau oleh masyarakat.; (5) Kesederhanaan Pakaian, maksudnya adalah tidak diwajibkan berseragam agar tidak memberatkan wali murid. Jadi pada dasarnya, prinsip penyelenggaraan Pos PAUD adalah mudah, murah, dan bermutu (Kemendikbud, 2011).

Prinsip mudah artinya artinya sederhana penyelenggaraannya, baik syarat, proses, maupun dalam sistem evaluasi. Murah artinya dengan semangat gotong royong, dimana masalah pendanaan operasional Pos PAUD dipikul bersama oleh masyarakat. Sementara bermutu dapat dicapai melalui keterpaduan dengan layanan pembinaan orang tuannya dan layanan kesehatan, serta keterpaduan antara Pos PAUD dan rumah dalam pemberian rangsangan pendidikan (Kemendikbud, 2011).

Secara praktis di lapangan, peranan masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan PAUD berbasis masyarakat ini sangatlah penting. Peran tersebut harus terwujud secara harmonis dalam semangat kebersamaan

untuk saling mengisi secara bertanggung jawab. Sebagai pemegang peranan sentral dan setrategis dalam penyelenggaraan Pos PAUD, pengelompokan peran masyarakat dapat dijabarkan sbb: (1) Tokoh masyarakat sebagai pemrakarsa, mediator, motivator, tutor, pengelola, dan bahkan sebagai penyandang dana maupun penyedia fasilitas pendidikan; (2) Organisasi masyarakat sebagai pemrakarsa, perencana, penyelenggara, organisator, pemberi motivasi, penyedia fasilitas, pengatur kegiatan, pengayom kegiatan, penyedia dana, pembina kegiatan dan pemecah masalah; (3) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pembangkit dan penyampai aspirasi masyarakat, pemberi motivasi, pendamping masyarakat, fasilitator, pengembang, penyedia dana, penyedia teknologi, penyedia informasi pasar, dan penyedia tenaga ahli, dan pengelola program (Machali, 2018).

Adapun unsur-unsur penyelenggaraan Pos PAUD ini terdiri dari peserta didik, orang tua, pendidik, pengelola, tim pemantau, tim Pembina tingkat desa/kelurahan, dan lembaga penyelenggara. Dalam hal teknis pembentukan Pos PAUD harus memperhatikan kriteria berikut ini: (1) Pemilihan Posyandu untuk diintegrasikan dengan PAUD; (2) Identifikasi dukungan lingkungan untuk menjamin keberlangsungan Pos PAUD seperti adanya anak usia dini sebagai calon peserta didik, adanya calon pengelola, dukungan masyarakat, tersedianya tempat, memiliki sumber pembiayaan; (3) Keterediaan fasilitas sarana prasarana dan administrasi yang mendukung pelaksanaannya; serta (4) Supervisi Pendidikan pada lembaga agar terdapat pembinaan, bimbingan dan perbaikan-perbaikan penyelenggaraan Pos PAUD (Ulfah, 2015).

Untuk mengukur keberhasilan dalam sebuah penyelenggaraan Pos PAUD dapat dinilai berdasarkan keadaan tempat belajar, kesiapan pendidik, jumlah peserta didik, jumlah waktu pelaksanaan program pembelajaran dalam seminggu, pendanaan, keterlibatan orang tua/wali siswa, pengelompokan, dan integrasi layanan. Hal ini sejalan dengan hasil sebuah penelitian tentang profesionalitas layanan lembaga PAUD, dikatakan bahwa penyelenggaraan PAUD Holistik integratif

mampu meningkatkan kualitas Pos PAUD karena mampu membantu memecahkan masalah keterbatasan pengetahuan tentang AUD, gizi dan *parenting* (Handayani, 2011).

Metode

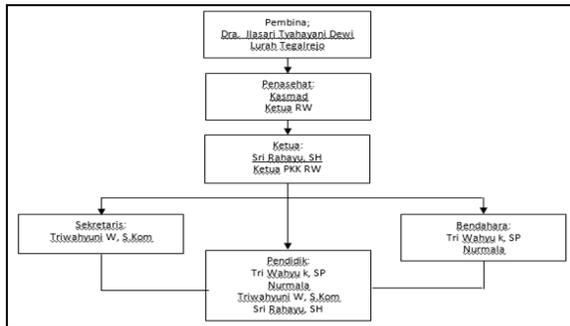
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik manajemen berbasis masyarakat dalam pengelolaan PAUD di Pos PAUD Wijaya Kusuma Yogyakarta, keterlibatan dan peran masyarakat dalam pengelolaan Pos PAUD tersebut, serta bagaimana strategi yang dilakukan pengelola untuk mengatasi hambatan pengelolaan lembaganya. Subjek penelitian adalah pengelola lembaganya. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari hasil wawancara untuk memperoleh informasi terkait pokok permasalahan yang diteliti. Sementara, data sekunder bersumber dari penelusuran kepustakaan terkait substansi dan permasalahan penelitian.

Alur penelitian terdiri dari beberapa tahap. Pertama, penentuan subjek penelitian. Adapun alasan pemilihan Pos PAUD Wijaya Kusuma sebagai subjek penelitian dikarenakan lembaga tersebut dipandang telah memiliki manajemen yang baik. Hal ini dibuktikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Pos PAUD ini mengalami perkembangan pesat dari segi prestasi, sarana prasarana, kualitas dan kuantitas kegiatan pembelajarannya. Kedua, tahap pengumpulan data prapenelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data prapenelitian dengan mencari informasi maupun data dari hasil penelitian terdahulu seperti data dari Dinas Pendidikan, Dapodik, dlsb. Data tersebut menjadi dasar untuk menentukan fokus penelitian. Ketiga, tahap penyusunan data untuk penelitian. Keempat adalah tahap untuk pengumpulan data. Tahap ini dilakukan melalui proses wawancara mendalam, observasi di lapangan, dan penelusuran dokumentasi lembaga. Kelima, melakukan uji keabsahan data dengan triangulasi, baik triangulasi sumber

maupun teknik. Terakhir adalah melakukan analisis data dengan model analisis Miles & Huberman melalui proses reduksi data, display data, dan pembuatan konklusi (Sugiono, 2018).

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, ditemukan bahwa Pos PAUD Wijaya Kusuma Yogyakarta memiliki otonomi dalam pengelolaan lembaga atau tergolong dalam model manajemen pendidikan berbasis masyarakat. Pos PAUD Wijaya Kusuma diselenggarakan untuk melayani kebutuhan pendidikan anak usia 2-4 tahun. Manajemen lembaga ini dikelola oleh tim Penggerak PKK RW 6 Tegalrejo Yogyakarta melalui Pokja II PKK di bawah pembinaan kepala desa/lurah Tegalrejo Yogyakarta. Susunan organisasi pengelola lembaga ini terdiri dari pembina, penasihat, ketua, sekretaris, bendahara, dan pendidik. Adapun susunan organisasi ini dapat disajikan dalam bagan sbb:



Bagan 1.1 Susunan Organisasi Pos PAUD Wijaya Kusuma

Berdasarkan susunan organisasi tersebut, tampak jelas bahwa secara manajerial, manajemen Pos PAUD Wijaya Kusuma tergolong ke dalam manajemen berbasis masyarakat. Pos PAUD ini didirikan sejak tahun 2007 dengan nama Pos PAUD Amalia dan berganti nama menjadi Pos PAUD Wijaya Kusuma sejak tahun 2010. Pos PAUD ini berlokasi strategis di tepi jalan desa dan menggunakan fasilitas balai desa sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan. Sejak awal 2018, Pos PAUD Wijaya Kusuma telah resmi memiliki gedung sendiri di belakang balai desa dengan menempati gudang balai desa yang

dirubah menjadi kelas untuk belajar. Hingga tahun 2020 ruangan belajar terus mengalami renovasi hingga penambahan, sehingga kini total ruang belajar mencapai 3 kelas ditambah aula dan ruang bermain *outdoor* yang luas.

Dalam pelaksanaan manajemen lembaga ini tentunya bukan tanpa kendala. Menurut hasil interview dengan ketua lembaga, beberapa kendala yang dialami dahulunya sempat menghambat proses penyelenggaraan layanan PAUD ini. Adapun kendala yang dirasa cukup berarti adalah terkait gedung sekolah yang harus dipakai bergantian dengan aktivitas lainnya sehingga pelaksanaan KBM tidak bisa berjalan dan terjadwal dengan baik. Kemudian kondisi sarana prasarana yang tidak mendukung (terutama APE sebagai media belajar) turut menghambat kelancaran proses belajar mengajar. Ditambah lagi Kualitas SDM yang rendah karena belum memahami ilmu PAUD, dirasa cukup mempersulit proses pelaksanaan KBM. Dan terakhir dan paling utama adalah terkait masalah biaya operasional lembaga.

Menyadari bahwa kendala-kendala tersebut dapat menghambat penyelenggaraan Pos PAUD ini, maka perombakan manajemen pengelolaan lembaga tersebut dilakukan di bawah binaan pemerintah desa maupun penilik PAUD. Sebuah strategi manajemen diperlukan demi mempertahankan eksistensi lembaga ini. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa manajemen PAUD meliputi pengelolaan, pengaturan, dan pengarahan proses interaksi edukatif antara anak didik dan guru, serta lingkungan secara teratur, terencana dan tersistematisasi agar tercapai tujuan lembaga PAUD (Suyadi, 2013). Dalam manajemen pendidikan terdapat tujuh komponen penting yang harus diketahui, yaitu manajemen, kurikulum, keuangan, sarana prasarana, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan hubungan masyarakat (Ulfah, 2015).

Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi di lapangan, kendala yang dihadapi Pos PAUD Wijaya kusuma sangat dirasakan terkait dengan manajemen sarana prasarana, manajemen pendidik, manajemen keuangan, serta manajemen hubungan masyarakat. Hal ini kemudian dijadikan bahan evaluasi oleh para *stakeholder* untuk dirumuskan pemecahan

masalah tersebut. Seringkali keuangan menjadi sumber utama masalah dalam penyelenggaraan PAUD berbasis masyarakat. Hal ini dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan proses pendidikan ternyata memerlukan banyak biaya. Seringkali masalah ini menjadi salah satu penyebab utama tutupnya layanan pendidikan semacam Pos PAUD. Tentu saja tutupnya banyak layanan Pos PAUD turut berimbas pada turunnya APK PAUD tingkat nasional. Maka untuk dapat mempertahankan eksistensinya, layanan PAUD berbasis masyarakat harus mampu melakukan manajemen yang baik yang dapat mendukung keberlangsungan lembaga PAUD dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

Berikut ini akan disajikan bagaimana manajemen Pos PAUD Wijaya Kusuma diselenggarakan sehingga ia mampu bertahan sebagai lembaga pendidikan sosial, bahkan mampu berkembang dengan pesat hingga saat ini:

1. Terkait Manajemen Keuangan

Sumber utama pendanaan Pos PAUD adalah dari masyarakat. Oleh karena itu, butuh kerjasama yang solid antara lembaga Pos PAUD dengan masyarakat untuk bergotong royong menanggung dalam hal penyelenggaraan. Berdasarkan hasil interview dengan ketua Pos PAUD Wijaya Kusuma, biaya operasional lembaga diperoleh dari: (a) Iuran SPP yang terjangkau masyarakat; (b) Bantuan dana dari RT melalui PKK; (c); Bantuan dana dari RW; (d) Donatur tetap; (e) BOP; (f) Dana Desa. Dengan terkumpulnya dana dari berbagai sumber tersebut, Pos PAUD Wijaya Kusuma dapat mengembangkan lembaga, baik terkait pengadaan gedung, sarana dan prasarana, pengadaan APE, media belajar, insentif pendidik, dlsb.

2. Terkait Manajemen Sarana Prasarana

Demi menunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, Pos PAUD Wijaya Kusuma, keberadaan gedung sebagai sarana belajar akan mendukung kenyamanan dan konsentrasi belajar siswa. Berdasarkan hasil observasi dan *interview* ketua Pos PAUD Wijaya Kusuma, saat ini Pos PAUD Wijaya Kusuma memiliki 3 ruang belajar, 1 aula, 1 ruang bermain *outdoor*, serta sanitasi yang baik. Berdasarkan pengamatan peneliti, keberadaan bangunan-bangunan

tersebut telah memenuhi *standard* sarana prasarana penyelenggaraan lembaga PAUD. Kemampuan Pos PAUD Wijaya Kusuma untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana tersebut didapat dari kerjasama antara pengelola lembaga dengan pemerintah desa setempat. Dukungan dana dari pemerintah desa mampu mendorong pengembangan sarana prasarana yang sesuai *standard* penyelenggaraan PAUD.

3. Terkait Manajemen Pendidik

Dalam pemberian rangsangan pendidikan bagi anak usia dini, tentunya sangat dibutuhkan peran pendidik sebagai fasilitator proses pembelajaran. Untuk itu, kualitas keilmuan pendidik sangat dibutuhkan, meskipun dalam penyelenggaraan PAUD berbasis masyarakat (seperti Pos PAUD) pendidiknya hanya berasal dari masyarakat sekitar yang latar belakang keilmuannya bukan dari keilmuan PAUD. Di Pos Wijaya Kusuma, demi mempertahankan mutu dan kualitas pembelajaran, maka rekrutmen pendidik dilakukan dengan diawali membuat kesepakatan untuk bersedia diikutkan diklat pendidik PAUD. Dengan melakukan dan mengikuti berbagai diklat, *workshop*, dlsb diharapkan kualitas masikan pendidik PAUD di Pos PAUD Wijaya Kusuma dapat memenuhi standard kompetensi pendidik PAUD. Dan dengan terpenuhinya *standard* kompetensi pendidik PAUD, maka mutu dan kualitas pembelajaran dapat terjamin.

4. Terkait Manajemen Hubungan Masyarakat

Manajemen PAUD berbasis masyarakat merupakan manajemen dari, oleh dan untuk masyarakat. Oleh karena itu, hubungan yang baik dengan masyarakat menjadi *the main support system* dalam penyelenggaraan Pos PAUD. Pos PAUD Wijaya Kusuma yang memang terbentuk dari program kerja pokja II PKK RW setempat, dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi baik dengan berbagai organisasi masyarakat maupun pemerintah desa setempat. Adapun bentuk kerjasamanya diantaranya terkait penghimpunan dana, pengintegrasian layanan pendidikan dengan program Posyandu dan Bina Keluarga Balita, hingga bekerjasama dengan pusat kesehatan masyarakat untuk mendukung layanan PAUD Holistik Integratif. Tujuan kerjasama tersebut

adalah untuk memberikan layanan berkualitas secara menyeluruh terhadap pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan.

Selain itu, POS PAUD Wijaya Kusuma juga menjadi bagian dari organisasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan mulai dari Himpaudi, Gugus PAUD, dlsb. Dengan menjalin kerjasama dan menjadi bagian darinya, semakin menambah kuat eksistensi POS PAUD Wijaya Kusuma sebagai lembaga PAUD yang *non profit oriented*. Keuntungan lain yang didapat dari manajemen hubungan masyarakat yang baik adalah akses informasi yang mudah dan cepat dalam mengembangkan lembaga PAUD. Diantaranya adalah peningkatan kualitas pendidik, tenaga kependidikan, maupun kualitas peserta didik.

Hingga saat ini berbagai prestasi telah ditorehkan oleh pengelola Pos PAUD Wijaya Kusuma hingga peserta didiknya, diantaranya sbb: Juara 1 Lomba Menari Tingkat Kecamatan Tahun 2010; Juara 2 Senam PAUD Tingkat Kecamatan Tahun 2011; Juara 1 dan 2 *Baby Dance* Tingkat Kecamatan Tahun 2011; Juara 3 Modeling Tingkat Kecamatan Tahun 2011; Juara 1 dan 2 Lomba Menari Tingkat Kecamatan Tahun 2014; Juara 2 Lomba Bayi Sehat Tingkat Kelurahan Tahun 2014; Juara 3 Lomba PAUD Berprestasi Tingkat Kota Yogyakarta Tahun 2017, dll. Keseluruhan prestasi dan progres ini semua semakin menunjukkan bahwa Pos PAUD Wijaya Kusuma mengalami perkembangan pesat dalam pengelolaan lembaga melalui strategi manajemen berbasis masyarakat yang baik.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Pos PAUD Wijaya Kusuma merupakan salah satu bentuk pendidikan berbasis masyarakat yang didirikan oleh masyarakat dan beranggotakan unsur-unsur perangkat desa, tokoh, dan anggota Tim Penggerak PKK RW 6 tegalrejo. Dalam operasional lembaga, Pos PAUD Wijaya Kusuma telah berjalan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pos PAUD, yaitu: (1) Melaksanakan program pembelajaran untuk anak usia 2-4 tahun dengan frekuensi pertemuan 3 kali perminggu; (2) Ketersediaan Alat Permainan Edukatif out door dan indoor yang lengkap; (3) Memiliki pengelola yang terdiri

dari masyarakat sekitar dan ditetapkan dengan SK kepala desa/lurah Tegalrejo, serta memiliki struktur organisasi yang jelas; (4) Memiliki beberapa fasilitas tempat bermain dan belajar yang luas dan representatif untuk penyelenggaraan PAUD; serta (5) Memiliki seragam sekolah melalui bantuan dana dari donatur.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, pos PAUD Wijaya Kusuma berkoordinasi dengan Posyadu sebagai layanan kesehatan dan deteksi tumbuh kembang anak usia dini, serta bekerjasama dengan program Bina Keluarga Balita (BKB) sebagai layanan *parenting class* bagi orang tua siswa. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pos PAUD Wijaya Kusuma merupakan salah satu wujud PAUD Holistik integratif karena keterpaduan layanan pendidikan dengan layanan pembinaan orang tua dan layanan kesehatan. Terkait dengan manajemen penyelenggaraan PAUD, Pos PAUD Wijaya Kusuma: (1) Menggunakan KTSP Sesuai Peraturan kurikulum K13; (2) Jumlah peserta didik Pos PAUD Wijaya kusuma sebanyak 20 anak dengan rentang usia 2-4 tahun; (3) Tenaga pendidik dan kependidikan merupakan warga masyarakat sekitar yang umumnya sebagai anggota PKK RW setempat yang telah diikutsertakan dalam berbagai diklat dan workshop PAUD; (4) Pengadaan dan perawatan sarana prasarana bersumber dari dana yang dihimpun dari berbagai bantuan pemerintah maupun desa; (5) Pembiayaan operasional lembaga diperoleh dari iuran SPP siswa, donatur tetap, iuran RT, dana RW, dana desa, dan BOP; (6) Evaluasi Lembaga dilakukan oleh penilik PAUD dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Keberhasilan penyelenggaraan Pos PAUD Wijaya Kusuma didapat dari koordinasi yang solid antara masyarakat dan pemerintah, sehingga berbagai hambatan yang dialami dapat diatasi dengan baik. Bahkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Pos Wijaya Kusuma mengalami progres perkembangan yang pesat, ditandai dengan berbagai prestasi yang ditorehkan PTK, siswa, hingga lembaga tersebut. Juga ditandai dengan penambahan sarana prasarana pendukung, seperti kebutuhan APE yang lengkap hingga perluasan gedung sekolah.

Daftar Pustaka

- Aprianti, Marliani, *Belajar pada Anak Usia Dini Di Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir*, dalam <https://repository.unsri.ac.id>. Diakses tanggal 21 Desember 2020.
- Direktorat Pembinaan PAUD. (2006). *Bahan Kebijakan Pembinaan PAUD*, Kemendikbud: Dirjen PAUDNI, UU Sisdiknas No, 20 Tahun 2003.
- Dirjen PAUDNI. (2011). *Juknis Penyelenggaraan Pos PAUD*. Jakarta: Kemendiknas.
- Handayani, Ari, dkk. (2011). *Peningkatan Kualitas Pos PAUD Melalui Pengembangan Program Holistik Integratif (Penelitian Tindakan Pada Pos PAUD Se-Kalurahan Penggaron Kidul)*, *Jurnal Penelitian PAUDIA*, Fakultas Ilmu Pendidikan, Vol. 1 Nomor 1.
- Kemendikbud, *Pendidikan Anak Usia Dini*, dalam www.paud.kemdikbud.go.id. Diakses tanggal 20 Desember 2020.
- Machali, Imam & Ara Hidayat. (2020). *Pengelolaan Pendidikan: Konsep, Prinsip dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah*. Dalam www.digilib.uinsgd.ac.id. Diakses tanggal 21 Desember 2020.
- Machali, Imam, dkk. (2018). *The Handbook of Education Management: Teori dan Praktik Pengelolaan Sekolah*. Jakarta: Kencana.
- Mentri Pendidikan dan Kebudayaan, *Rencana Strategis Kemdikbud*, dalam www.kemdikbud.go.id. Diakses tanggal 21 Desember 2020.
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suyadi. (2014). *Teori Pembelajaran AUD Dalam Kajian Neurosains*. Bandung: Rosdakarya.
- Suyadi. (2013). *Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Tedjawati. (2020). *Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dalam Rangka Otonomi Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Kulon Progo* dalam <https://adoc.pub/penyelenggaraan-program-pendidikan-anak-usia-dini-paud-dalam.html>. Diakses tanggal 20 Desember 2020.
- Terry R. George & Leslie W, Rue. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI. (2011). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Ulfa, Maria. (2015). *“SYAHADAT“ Sebuah Pendekatan Dalam Mengoptimalkan Manajemen PAUD Berbasis Masyarakat*. *Jurnal Al-Ijtima'iyah*. Vol. 1, Nomor 1.
- Ulfah, Fari. (2015). *Manajemen PAUD*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.